

LAPORAN THESIS
PROSES PENERAPAN OMNIBUS LAW KLASTER
KETENAGAKERJAAN PADA PT X



ANGGORO DAVID WIDAGDO
19.D3.0026

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

**PROSES PENERAPAN OMNIBUS LAW KLASTER
KETENAGAKERJAAN PADA PT X**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Magister Manajemen

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Diajukan Oleh:

NAMA : Anggoro David Widagdo

NIM : 19.D3.0026

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024



ABSTRAK

Pada Tahun 2020 muncul isu tentang aturan ketenagakerjaan baru yang disebut Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Setelah peraturan tersebut resmi terbit pada Tahun 2021 dan diatur dalam PP 35 Tahun 2021. Muncul banyak kontroversi dari masyarakat tentang peraturan tersebut dan terjadi beberapa persepsi di perusahaan yang akan menerapkan peraturan tersebut. Seperti pada Perusahaan PT X. PT X adalah suatu perusahaan manufaktur yang terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. PT X bergerak pada bidang manufaktur pembuatan *packaging* produk dan percetakan label produk. PT X telah menerapkan 80 persen dari PP 35 Tahun 2021 yang menjadi salah satu peraturan dalam Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Penerapan omnibus law klaster ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan mengetahui proses yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penerapan peraturan tersebut dalam perusahaan merupakan hal penting untuk diketahui dan menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang bersifat naratif, dengan informan kunci adalah manajer HRD, Ketua SPSI dan masing-masing 2 karyawan yang mewakili dari seluruh departemen yang terkena perubahan kebijakan ketenagakerjaan di PT X. Hasil penelitian ini menunjukkan proses penerapan omnibus law klaster ketenagakerjaan meliputi pembuatan aturan terbaru, sosialisasi, monitoring atau evaluasi dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan omnibus law klaster ketenagakerjaan seperti cara melakukan kesepakatan antara manajer HRD, SPSI dan Manajemen tentang PKB baru yang mencakup omnibus law klaster ketenagakerjaan serta keterbatasan PKB yang dibagikan kepada Karyawan di PT X. Penelitian ini diharapkan menjadi materi untuk Pihak Manajemen dan HRD untuk melakukan evaluasi tentang penerapan omnibus law klaster ketenagakerjaan pada PT X.

Kata kunci: Proses, Penerapan, Omnibus Law, Klaster Ketenagakerjaan, Kendala.

ABSTRACT

In 2020, an issue emerged regarding new employment regulations called Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. After the regulation was officially published in 2021 and regulated in PP 35 of 2021, there was a lot of controversy from the public regarding this regulation and there were several perceptions in companies that would implement this regulation like X Company. X is a manufacturing company located in Kudus Regency, Central Java. X Company is engaged in manufacturing, making product packaging and printing product labels. The application of Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan can cause various problems and knowing the process carried out by company management in implementing these regulations within the company is important to know and interesting to do research. This research uses a qualitative narrative approach, with key informants being the HRD manager, Head of SPSI and 2 employees each representing all departments affected by changes in employment policies at X company the latest regulations, socialization, monitoring or evaluation and obstacles that occur in the implementation of Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan, such as how to make an agreement between HRD managers, SPSI and Management regarding the new PKB which covers Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan as well as the limitations of the PKB distributed to employees at X Company It is hoped that this research will become material for Management and HRD to evaluate the implementation of the employment cluster omnibus law at PT X.

Keywords: Process, Implementation, Omnibus Law, Employment Cluster, Constraints.